

DOI: <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i2.518>

P-ISSN 2614-7238

Terakreditasi (SINTA 4) SK No. 28/E/KPT/2019

TINGKAT PARTISIPASI PENGELOLAAN DAN ANALISIS FINANSIAL HUTAN RAKYAT DENGAN SISTEM TUNDA TEBANG DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

*Level of Management Participation and Financial Analysis of The Community Forest
With a Logging Delay System In The South Konawe Regency*

La Ode Agus Salim Mando, Aminuddin Mane Kandari, Kahirun, Rosmarlinasiah,
Safiril Kasim, La Ode Midi, Wa Ode Inda dan Sitti Mardhatillah

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Jalan Mayjen S. Parman, Kampus Lama UHO Kendari

*Email : l4s4n@yahoo.co.id

Direvisi: 18/06/2020, Diterbitkan: 01/08/2020

ABSTRACT

*This study aims to determine the mechanism, level of participation, financial analysis in following the logging delayed program in community forests. The research was located in the community forests of Watudemba and Ulu Lakara villages, Konawe Selatan District from April to May 2018. Data collection techniques were carried out by observation, direct communication with 16 respondents and bibliographical studies. In addition, measurements were made by making 17 sample plots of teak stands (*Tectona grandis* L.f). The data analysis uses quantitative and qualitative methods. The results showed that: 1) The logging delay program mechanism consists of three stages, namely agreeing and signing a pending felling program agreement, distribution and loan repayment. 2) the level of community participation in participating in the logging delay program at the planning stage (moderate-high, 81.25%), organizing (moderate-high, 68, 75%), implementation (moderate-high, 81.25%), as well as supervision and evaluation (moderate-high, 56.25%). 3) NPV value obtained is Rp. 266,811,200,-; BCR value obtained was 5.29; and the IRR value obtained by 37% over the age of the analysis of twenty years. Farmers' participation in participating in the delay logging program is generally relatively high, but still needs more special attention from the government, so that more farmers participate in this program. Especially when viewed from the financial benefits of this program is in a positive trend that indicates feasible to continue.*

Keywords; *Financial Analysis, Community Forest, Logging Delay Mechanism, Management Participation Rate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, tingkat partisipasi, analisis finansial dalam mengikuti program tunda tebang pada hutan rakyat. Pelaksanaan penelitian berlokasi di hutan rakyat Desa Watudemba dan Ulu Lakara Kabupaten Konawe Selatan pada bulan April sampai dengan Mei 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, komunikasi langsung terhadap 16 responden dan studi bibliographis. Selain itu, dilakukan pengukuran dengan membuat 17 plot sampel tegakan Jati (*Tectona grandis* L.f). Adapun Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) mekanisme program tunda tebang terdiri atas tiga tahapan yaitu menyepakati dan menandatangani perjanjian program tunda tebang, penyaluran, dan pengembalian pinjaman. 2) tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tunda tebang pada tahap perencanaan (sedang-tinggi, 81,25%), pengorganisasian (sedang-tinggi, 68,75%), pelaksanaan (sedang-tinggi, 81,25%), serta pengawasan dan evaluasi (sedang-tinggi,

56,25%). 3) Nilai NPV diperoleh sebesar Rp. 266.811.200,-; nilai BCR diperoleh sebesar 5,29; dan nilai IRR diperoleh sebesar 37 %. Partisipasi petani dalam mengikuti program tunda tebang secara umum relatif tinggi, namun tetap perlu mendapat perhatian yang lebih khusus dari pemerintah, agar petani lebih banyak lagi yang ikut dalam program ini. Apalagi bila dilihat dari keuntungan secara finansial program ini berada pada trend positif yang mengindikasikan layak untuk dilanjutkan.

Kata kunci; Analisis Finansial; Hutan Rakyat; Mekanisme Program Tunda Tebang; Tingkat Partisipasi Pengelolaan

PENDAHULUAN

Silih berganti sistem pengelolaan hutan yang ada di dunia dan khususnya di Indonesia menunjukkan kehancuran hutan yang tidak terkendali. Hal ini dipicu oleh adanya pengelolaan hutan yang berparadigma *timber extraction* (*penambangan kayu*). Meskipun paradigma ini kemudian berubah menjadi *timber management* (manajemen kebun kayu) yang sedikit lebih maju dalam tataran konsep, namun prakteknya tidak jauh beda dengan era penambangan kayu yang masih berlanjut sampai sekarang ini (Mando, 2006 *dalam* Midi dan Mando, 2015; Mando *et al.*, 2018).

Menghadapi kenyataan bahwa sistem pengelolaan hutan secara konvensional telah mengalami kegagalan yang disebabkan oleh perhatian manusia yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek keseimbangan ekosistem, sehingga telah menyebabkan kerusakan hutan yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Hal itu kemudian semakin diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Simon (2008), konsekuensi logis dari pertambahan jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan bahan pangan, kayu bakar, kayu perkakas dan pertukangan, hijauan makanan ternak dan penurunan rasio kepemilikan lahan pertanian.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berujung pada semakin meluasnya kerusakan hutan, maka para ahli kehutanan di dunia melakukan Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta yang Ke VIII tahun 1978 dengan tema *forest for people* (Simon, 2010). Dari pertemuan inilah menjadi cikal bakal perubahan paradigma pengelolaan *hutan timber management* menjadi lebih holistik dan komprehensif menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Paradigma pengelolaan hutan ini lebih dikenal dengan sebutan *social forestry* (perhutanan sosial).

Salah satu implementasi paradigma perhutanan sosial adalah dengan dikembangkannya hutan rakyat. Menurut Pratama *et al.* (2015) bahwa manfaat yang bisa diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat antara lain pemenuhan kebutuhan kayu (Setiawan *et al.*, 2014), peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas lahan milik masyarakat dan adanya kesempatan kerja untuk masyarakat pedesaan.

Beberapa wilayah di Indonesia yang telah mengembangkan hutan rakyat adalah Desa Watudemba Kecamatan Palangga dan Ulu Lakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Pola hutan rakyat yang dikembangkan yakni pola monokultur dengan jenis tanaman jati lokal (*Tectona grandis* L.f). Dalam proses pengelolaan rakyat selanjutnya masyarakat dihadapkan pada waktu pemanenan yang sesuai dengan daur atau masak tebang. Kebiasaan yang sering terjadi pada petani di kedua desa tersebut dalam menentukan waktu pemanenan berdasarkan tebang butuh. Tebang butuh dilakukan lebih didasarkan pada desakan ekonomi petani meskipun diketahui tanaman jati belum memasuki umur panen. Kenyataan seperti itu, hampir sama terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang mengembangkan hutan rakyat.

Melihat kondisi seperti itu, maka pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki program yang dinamakan Kredit Tunda Tebang (KTT). Menurut BLU Pusat P2H (2017), Manfaat adanya program ini yaitu secara ekonomi jelas bahwa masyarakat akan mendapatkan dana tanpa harus menebang kayu. Secara ekologis, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tunda tebang ini akan mengoptimalkan fungsi pohon

dalam kondisi berdiri, karena seperti yang kita ketahui, pohon akan mempunyai fungsi maksimal dalam kondisi berdiri. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme, tingkat partisipasi petani, dan kelayakan usaha dalam mengikuti program tunda tebang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada hutan rakyat yang masuk dalam program tunda tebang di Desa Watudemba dan Desa Ulu Lakara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2018. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Palangga terletak dititik 04°35'13"6" Lintang Selatan dan 122°34'34.1" Bujur Timur. Bahan yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan tali rafia. Adapun alat yang digunakan seperti : alat tulis menulis, alat perekam, hoga meter, meteran roll, pita meter, GPS (*geografy positioning system*), kamera dan kalkulator.

Populasi dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) obyek yaitu petani yang mengikuti program tunda tebang dan hutan rakyat yang dimiliki oleh petani. Untuk obyek pertama, maka seluruh anggota kelompok tani hutan rakyat Mepokoaso di Kecamatan Palangga dan Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan yang berjumlah 16 orang menjadi populasi. Menurut Arikunto (2006) berpendapat bahwa jika populasi kurang dari 100 maka populasi dijadikan sebagai sampel, namun jika lebih dari 100 orang, penarikan sampel dilakukan sebanyak 10-30% dari populasi. Sehingga jumlah responden yang menjadi sampel juga 16 orang.

Adapun objek kedua, Populasi untuk tegakan jati yaitu: seluruh tegakan Jati (*Tectona grandis* L.f) yang masuk dalam sistem tunda tebang pada hutan rakyat Kelompok Tani Mepokoaso dengan luas 13,2 ha atau 132.000 m². Luas sampel ditentukan dengan menentukan intensitas sampling sebesar 5%, sehingga diperoleh luas sampel sebesar 0,66 ha (6.600 m²). Apabila luas 1 (satu) petak ukur berjumlah 20 m x 20 m, maka jumlah petak ukur sebesar 17 petak ukur. Penempatan petak ukur dilakukan dengan menggunakan *random sampling with replacement* yaitu dimana semua anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Simon, 2015).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Dimana penerapannya dilakukan sebagai berikut : 1) Mekanisme program tunda tebang: dianalisis secara kualitatif data dari responden terkait mekanisme mengikuti program tabang tunda. 2) Analisis tingkat partisipasi dilakukan dengan menggunakan *skala likert*. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan komunikasi langsung menggunakan pedoman wawancara dan selanjutnya dianalisis dan diolah dalam bentuk tabulasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian hasilnya dinilai dalam bentuk skoring. Untuk skoring menggunakan model *skala likert* yang dimodifikasi mulai dari angka 1, 2 dan 3 yang ditujukan pada masing-masing variabel yaitu partisipasi responden. Pilihan masing-masing jawaban untuk setiap responden diberi skor sebagai berikut: Skor 1 berarti rendah, Skor 2 berarti Sedang, Skor 3 berarti Tinggi. Berdasarkan metode skor tersebut, maka mesti dihubungkan dengan jumlah pertanyaan masing-masing variable partisipasi. Dimana setiap variabel terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, sehingga untuk masing-masing variabel partisipasi akan diketahui dengan formula sebagai berikut (Manalu *et al.*, 2015) :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah kelas}} \\ &= \frac{6-2}{3} \\ &= 1,3 \end{aligned}$$

dimana; nilai tertinggi adalah 6 (jumlah pertanyaan dikalikan skor tertinggi, 2 x 3 = 6), nilai terendah = 2 (jumlah pertanyaan dikalikan skor terendah, 2 x 1 = 2), jumlah kelas adalah 3.

Setelah diketahui intervalnya, maka dapat ditentukan kelas interval untuk masing-masing variabel partisipasi masyarakat. Sehingga, penilaian pada tahap perencanaan, organisasi, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, serta Pengawasan dan Evaluasi

Table 1. Criteria for Assessing Community Participation in the Planning, Organizational, Implementation, and Monitoring and Evaluation Stages

No	Kriteria/Interval	Tingkat Partisipasi
(1)	(2)	(3)
1.	2,00 – 3,29	Rendah
2.	3,30 – 4,59	Sedang
3.	≥ 4,60	Tinggi

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018.

3) Analisis data yang digunakan yaitu komponen biaya dan manfaat, untuk mengetahui layak tidaknya suatu usahatani yang dilakukan. Analisis finansial yang digunakan yaitu *Net Present Value*, *Internal Rate of Return* dan *Benefit Cost Ratio* (Hadisapoetra, 1973 dalam Sutisna, 2015; Khotimah dan Sutisno, 2014; Setiawan dan Lahjie, 2011; Perkins, 1994 dalam Kusumedi dan Nawir, 2010).

Net Present Value merupakan nilai sekarang dari manfaat atau pendapatan dan biaya atau pengeluaran. Dengan demikian apabila NPV bernilai positif dapat diartikan sebagai besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha. Sebaliknya NPV yang bernilai negative menunjukkan kerugian.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{B_t - C_t}{(1+i)^t}$$

dimana ; B_t = penerimaan (*benefit*) pada tahun ke- t ; i = *discount rate* yang berlaku (6%); C_t = biaya (*cost*) pada tahun ke- t ; n = umur usaha (tahun). Selanjutnya penilaian parameter NPV ditentukan berdasarkan kriteria yaitu : 1) $NPV > 0$, maka usaha tani menguntungkan dan dapat atau layak dilaksanakan; 2) $NPV = 0$, maka usaha tani tidak untung dan tidak juga rugi; 3) $NPV < 0$, maka usaha tani merugikan karena keuntungan lebih kecil dari biaya, jadi lebih baik tidak dilaksanakan.

Internal Rate of Return yaitu tingkatan suku bunga yang membuat usaha akan mengembalikan semua investasi selama umur usaha tani. Inti analisis finansial adalah membandingkan antara pendapatan dengan pengeluaran, dimana suatu kegiatan atau usaha layak apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran.

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 + NPV_2} \times (i_2 - i_1)$$

dimana ; i_1 = *discount rate* yang menghasilkan NPV positif; i_2 = *discount rate* yang menghasilkan NPV negative; NPV_1 = NPV yang bernilai positif; NPV_2 = NPV yang bernilai negative. Selanjutnya penilaian parameter IRR ditentukan sesuai dengan criteria berikut : 1) $IRR > \text{discount rate}$ yang berlaku, maka kegiatan usaha tani layak dijalankan; 2) $IRR < \text{discount rate}$ yang berlaku, maka kegiatan usaha tani tidak layak dijalankan.

Benefit cost ratio merupakan suatu cara evaluasi suatu usaha dengan membandingkan nilai sekarang seluruh hasil dengan nilai sekarang seluruh biaya proyek. BCR diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan terdiskonto dengan jumlah biaya terdiskonto.

$$BCR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Bt}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{Ct}{(1+i)^t}}$$

dimana ; Bt = penerimaan (*Benefit*) pada tahun ke-t; Ct = biaya (cost) pada tahun ke-t; t = umur usaha (tahun); I = *discount rate* yang berlaku (6%); BCR > 1, maka usaha tani layak atau menguntungkan; BCR < 1, maka usaha tani tidak layak atau tidak menguntungkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dalam Program Tunda tebang

Mekanisme yang akan dilihat dalam penelitian ini meliputi : syarat penandatanganan perjanjian program tunda tebang pada kelompok tani hutan rakyat (KTHR) *Mepokoaso* serta tahapan penyaluran dan pengembalian dana.

1. Tahap Perjanjian Program Tunda Tebang

Syarat penandatanganan perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu : 1) pemohon harus menjadi anggota KTHR yang jelas, misalnya masuk dalam anggota KTHR *Mepokoaso*; 2) perjanjian pinjaman ditandatangani oleh pemohon beserta dengan suami/istri yang sah dihadapan notaris, memiliki dan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang sah dan masih berlaku; 3) penerima pinjaman telah setuju dan telah menandatangani ketentuan pembiayaan pinjaman; 4) luasan lahan hutan rakyat yang masuk dalam program tunda tebang tidak lebih dari 2, Ha dengan dana permohonan tidak lebih dari Rp. 200.000.00,-; 5) pemilihan pohon agunan harus memiliki keliling minial 45 cm dan terkategori layak menjadi agunan (Badan Layanan Umum Pusat P2H, 2017).

2. Tahapan Penyaluran Dana

Pinjaman disalurkan dan dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) pinjaman disalurkan apabila seluruh persyaratan perjanjian telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pinjaman ini; 2) pinjaman disalurkan dengan cara pemindah bukuan rekening KTHR dari rekening BLU Pusat P2H. Untuk keperluan ini, KTHR memberi kuasa kepada BLU pusat P2H untuk membuka rekening penampungan atas nama KTHR ke rekening masing-masing penerima pinjaman tunda tebang HR; 3) pinjaman disalurkan secara bertahap berdasarkan ketentuan sebagai berikut : untuk penyaluran tahap I diberikan maksimal 70% dari dana yang diusulkan, dan dana tersebut akan diterima apabila seluruh persyaratan perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan pinjaman tanpa batasan waktu; 4) BLU Pusat P2H telah menerima surat permohonan penyaluran pinjaman dari KTHR yang ditanda tangani oleh penerima pinjaman tunda tebang hutan rakyat dan pengurus KTHR dan dilampiri *covernoot* dari notaris, copy nomor rekening pada buku tabungan untuk setiap penerima pinjaman tunda tebang hutan rakyat, copy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku milik penerima pinjaman dan kuasa pemindah bukuan; 5) penyaluran tahap II dan selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja penerima pinjaman tunda tebang hutan rakyat oleh BLU Pusat P2H.

3. Tahap Pengembalian Dana Peminjaman Tunda tebang

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu penerima pinjaman tunda tebang hutan rakyat wajib melunasi pokok dari bunga pinjaman (kewajiban) kepada BLU Pusat P2H dengan ketentuan sebagai berikut : 1) penerima pinjaman wajib mulai mencicil/mengangsur kewajiban sejak 24 (dua puluh empat) bulan setelah disalurkannya pinjaman untuk yang pertama kali sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban; 2) angsuran pinjaman dibayarkan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulanan/1 tahunan; 3) besaran nilai angsuran dalam satu tahun sekurang-kurangnya sebesar tingkat suku bunga dikali dengan seluruh pokok pinjaman; 4) pelunasan kewajiban dilaksanakan oleh penerima pinjaman tunda

tebang hutan rakyat paling lambat 30 hari setelah penebangan pohon yang ditunda tebangkan atau maksimal 8 tahun sejak disalurkannya pinjaman tunda tebang hutan rakyat untuk yang pertama kali.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Program Tunda tebang

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat diidentifikasi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi. Partisipasi pada tahap perencanaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan

Table 2. Participation Rates in Planning

No	Tingkat Partisipasi	Kelas Interval	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rendah	2,00-3,29	3	18,75
2.	Sedang	3,30-4,59	7	43,75
3.	Tinggi	≥ 4,60	6	37,5
Jumlah			16	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 2 bahwa tingkat partisipasi dalam perencanaan berada pada kategori sedang-tinggi yaitu sebanyak 13 responden (81,75%). Sedangkan 3 (tiga) responden (18,75%) berada pada kategori partisipasi rendah. Banyaknya petani yang berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan di Kabupaten Konawe Selatan sudah sesuai dengan beberapa penelitian lain di wilayah Indonesia. Menurut Fauzi (2009) dalam Sudrajat *et al.* (2016); Sukisman dan Hardoyo (2011) menyebutkan bahwa partisipasi dalam perencanaan pengelolaan hutan rakyat berada pada kategori sedang-tinggi.

Anggota yang berpartisipasi tinggi adalah anggota yang selalu menghadiri rapat perencanaan kegiatan sebanyak 9 kali pertahun dengan memberikan ≥ 1 saran, berpartisipasi sedang apabila menghadiri rapat perencanaan sebanyak 6 kali pertahun dan memberikan 1 saran. Sedangkan anggota yang dinyatakan berpartisipasi rendah adalah yang menghadiri rapat perencanaan untuk mengetahui program tunda tebang dengan intensitas 3 kali pertahun dan tidak memberikan saran. Semakin banyak petani mengikuti rapat dengan bertanya dan memberikan saran, maka semakin banyak pula mendapat informasi, sehingga lebih meningkatkan keterampilan dalam menyusun rencana kerja sendiri.

Partisipasi dalam bentuk keaktifan anggota KTHR Mepokoaso dalam perencanaan mengikuti pertemuan/rapat sudah sangat baik, dengan melibatkan seluruh anggota dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan. Pentury *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi dalam perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, mengharuskan seluruh anggota kelompok tani selalu hadir agar kesepakatan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan pengambilan keputusan secara mufakat (Winata dan Yuliana, 2012).

Tabel 3. Tingkat Partisipasi dalam Organisasi

Table 3. Participation Rates in Organizations

No	Tingkat Partisipasi	Kelas Interval	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rendah	2,00-3,29	5	31,25
2.	Sedang	3,30-4,59	6	37,5
3.	Tinggi	≥ 4,60	5	31,25
Jumlah			16	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 3 bahwa tingkat partisipasi dalam organisasi berada pada kategori sedang-tinggi yaitu sebanyak 11 responden (68,75%). Sedangkan 5 (lima) responden (31,25%) berada pada kategori partisipasi rendah. Anggota yang dinyatakan berpartisipasi tinggi apabila kehadiran dalam rapat sebanyak 12 kali pertahun dan memberikan ≥ 1 saran, berpartisipasi sedang apabila menghadiri rapat sebanyak 8 kali pertahun dan memberikan 1 saran. Adapun berpartisipasi rendah adalah mereka yang menghadiri rapat organisasi untuk kegiatan rutin tunda tebang sebanyak 4 kali pertahun dan tidak memberikan saran mengenai rapat kelompok.

Kehadiran petani dalam rapat, sedikit dan banyak memberikan manfaat yang begitu berarti terutama dalam penyampain saran dan pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi terutama seperti : pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penentuan visi-misi, tujuan, rencana dan sasaran, pemilihan pengurus, dan penentuan kegiatan dalam organisasi KTHR *Mepokoaso*. Meskipun disadari tidak semua petani dapat mengikuti kegiatan tersebut karena merasa sudah cukup terwakilkan dengan kehadiran anggota yang lain. Hal ini sejalan dengan O'neil (2001) dalam Anomsari (2013) bahwa meskipun partisipasi sering terinspirasi dari keinginan untuk membuat proses pengambilan keputusan yang terbuka, jelas tidak mungkin untuk melibatkan semua orang sehingga keterwakilan semua orang tidak pernah komplit.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan

Table 4. Participation Rates in Implementation

No (1)	Tingkat Partisipasi (2)	Kelas Interval (3)	Jumlah (Responden) (4)	Persentase (%) (5)
1	Rendah	2,00-3,29	3	18,75
2	Sedang	3,30-4,59	7	43,75
3	Tinggi	$\geq 4,60$	6	37,5
Jumlah			16	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4 bahwa tingkat partisipasi dalam pelaksanaan berada pada kategori sedang-tinggi yaitu sebanyak 13 responden (81,25%). Sedangkan 3 (tiga) responden (18,75%) berada pada kategori partisipasi rendah. Anggota yang dinyatakan berpartisipasi tinggi adalah apabila setiap rapat sosialisasi yang biasa dilakukan oleh pihak BLU Pusat P2H selalu hadir dan menyumbangkan pikiran dan melakukan tindakan pemeliharaan. Berpartisipasi sedang apabila hampir disetiap rapat sosialisasi ataupun kegiatan penyuluhan selalu hadir dan melakukan pemeliharaan. Berpartisipasi rendah apabila responden jarang memperhatikan dan memberikan masukan mengenai rapat sosialisasi ataupun penyuluhan.

Banyaknya petani yang berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Muis, 2007 dalam Sagita *et al.*, 2019). Faktor internal seperti tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, umur, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Adapun faktor eksternal menurut Sagita *et al.* (2019) seperti keberhasilan petugas pendamping dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, keaktifan para petani ikut dalam pertemuan Kelompok Tani Hutan (Suwardane *et al.*, 2015) dan Akses Informasi tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan yang diperoleh petani dari berbagai sumber baik dari sosialisasi, penyuluhan, maupun media massa atau internet.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi

Table 5. Participation Rates in Monitoring and Evaluation

No (1)	Tingkat Partisipasi (2)	Kelas Interval (3)	Jumlah (Responden) (4)	Persentase (%) (5)
1	Rendah	2,00-3,29	7	43,75
2	Sedang	3,30-4,59	3	18,75

3	Tinggi	≥ 4,60	6	37,5
		Jumlah	16	100

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 5 bahwa tingkat partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi berada pada kategori sedang-tinggi yaitu sebanyak 9 (sembilan) responden (56,25%). Anggota yang dinyatakan berpartisipasi tinggi apabila responden melakukan pengawasan pada tegakan jati yang masuk dalam program tunda tebang sebanyak 12 kali pertahun, berpartisipasi sedang apabila melakukan pengawasan hanya 8 kali pertahun, sedangkan yang dinyatakan berpartisipasi rendah apabila responden melakukan pengawasan 4 kali pertahun.

Pentury *et al.* (2016) dalam penelitiannya menyatakan partisipasi evaluasi kegiatan kelompok tani dilakukan dengan memantau kegiatan kelompok dan mengukur berbagai hasil kegiatan usaha tani yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yaitu bermusyawarah mengenai berbagai kekurangan. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah melihat kualitas tegakan jati, melakukan pencekkan plat pohon yang menjadi tanda penomoran seperti keliling pohon, dan mengecek pemutaran dana yang telah dipinjamkan. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi di lokasi penelitian tergolong cukup. Bila dikomparasikan dengan penelitian Suprayitno *et al.* (2011) menggambarkan kegiatan pada tahap ini kurang digemari oleh petani, dimana petani hanya tertarik pada kegiatan pelaksanaan dan pemanfaatan, sehingga menurut Tanjung *et al.* (2017) diskusi dialogis pada waktu pengawasan hanya dihadiri oleh pengurus inti dan fasilitator dari pemerintah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tunda tebang pada tahap perencanaan, organisasi, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi masuk dalam kategori sedang-tinggi. Karena partisipasi di atas 50% (gabungan dari rata-rata partisipasi pada level sedang-tinggi) meskipun ada yang keluar dari program tunda tebang.

C. Analisis Finansial Hutan Jati Rakyat dengan Sistem Tunda tebang

Kriteria analisis finansial yang diamati yaitu terdiri dari indikator BCR, NPV dan IRR dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Badan Layanan Umum yaitu sebesar 6%. Perhitungan analisis finansial hutan rakyat di Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Mepokoaso berdasarkan volume tinggi total ($m^3 \cdot ha^{-1}$) dengan waktu penilaian 20 tahun. Hasil perhitungan analisis finansial menunjukkan bahwa nilai NPV sebesar Rp. 266.811.200,00. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman investasi pada lahan hutan rakyat ini akan memberikan keuntungan masing-masing sebesar Rp. 266.811.200,00 menurut nilai sekarang sehingga dikatakan layak untuk dikembangkan. Dengan kata lain bahwa pendapatan yang diterima petani pertahun bila menggunakan *Equivalent Annual Increment* (Malau *et al.*, 2013) diperoleh rata-rata Rp. 23.261.816,27. Nilai NPV ini masih tergolong besar bila dikomparasikan dengan hasil penelitian Setiawan dan Lahjie (2011) pada tingkat suku bunga 5 % dalam waktu penilaian selama 25 tahun diperoleh sebesar Rp. 41.502.000,- pada hutan jati monokultur.

Tabel 6. Analisis Finansial Hutan Rakyat pada Kelompok Tani Mepokoaso Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 (Berdasarkan Volume Tinggi Total)

Table 6. Financial Analysis of Community Forests in the Mepokoaso Farmers Group of Konawe Selatan Regency in 2018 (Based on Total High Volume)

Kriteria Finansial	Hutan Rakyat Monokultur	Kriteria Kelayakan Usaha
(1)	(2)	(3)
NPV	266.811.200	Layak diusahakan
BCR	5,2904	Layak diusahakan
IRR	37%	Layak diusahakan

Hasil perhitungan pada tingkat suku bunga 6 % nilai BCR berdasarkan volume tinggi total ($m^3 \cdot ha^{-1}$) yang diperoleh yaitu sebesar 5,2904. Bila dilihat dari nilai BCR yang diperoleh untuk hutan rakyat dengan sistem tunda tebang yang dikembangkan mempunyai nilai lebih dari satu maka sistem tunda tebang tersebut dapat dikatakan layak untuk dikembangkan atau diusahakan (Budiningsih dan Effendi, 2013; Kusumedi dan Nawir, 2010). Nilai BCR tersebut berarti bahwa setiap nilai sekarang, setiap pengeluaran sebesar satu rupiah akan menambah nilai pendapatan bersih sebesar Rp. 5,2904.



Gambar 1. Kondisi Hutan Rakyat Jati di Desa Watudemba Tahun 2018
Figure 1. Condition of Teak Community Forest in Watudemba Village in 2018

Internal Rate of Returns dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih dalam suatu usaha, dengan setiap benefit bersih yang diwujudkan (Bt-Ct yang bersifat positif) secara otomatis ditanam kembali dalam tahun berikutnya dan mendapat tingkat keuntungan yang sama yang diberi bunga selama sisa umur usaha (Kadariah *et al.*, 1997). Nilai IRR yang di dapatkan sebesar 37 %. Nilai IRR yang diperoleh melebihi suku bunga yang dipakai yaitu 6 % berarti kemampuan usaha untuk mengembalikan modal yang di gunakan lebih besar dari tingkat suku bunga yang harus dibayar. Sampai pada suku bunga 37%. Usaha hutan rakyat dengan sistem tunda tebang dapat diusahakan/dikembangkan karena menurut Malau *et al.* (2013); Ahyauddin *et al.* (2010) IRR lebih besar dari *Minimum Accestabilty Rate* (MAR = 6%).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Mekanisme program tunda tebang terdiri atas tiga tahapan yaitu menyepakati dan menandatangani perjanjian program tunda tebang, penyaluran, dan pengembalian pinjaman; 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tunda tebang pada tahap perencanaan (sedang-tinggi, 81,25%), pengorganisasian (sedang-tinggi, 68, 75%), pelaksanaan (sedang-tinggi, 81,25%), serta pengawasan dan evaluasi (sedang-tinggi, 56,25%); 3) Pengelolaan hutan jati rakyat monokultur program tunda tebang dinyatakan layak secara ekonomi dengan kriteria sebagai berikut : Nilai NPV diperoleh sebesar Rp. 266.811.200,-; nilai BCR diperoleh sebesar 5,29; dan nilai IRR diperoleh sebesar 37 %.

Melihat begitu potensinya pengelolaan hutan rakyat jati dengan mengikuti program tunda tebang layak untuk dikembangkan, maka pemerintah diharapkan lebih proaktif untuk

memberikan sosialisasi kepada petani hutan rakyat tentang pentingnya mengikuti program tunda tebang dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam persyaratan pencairan dan pengembalian kredit tunda tebang. Selanjutnya, bagi petani hutan rakyat diharapkan lebih aktif lagi dalam tahapan pengelolaan hutan rakyat dengan sistem tunda tebang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (FHIL UHO) Bapak Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si., yang telah memberikan izin guna terselenggaranya penelitian ini dan memberikan bantuan dana guna penyusunan makalah, sehingga dapat berjalan dengan lancar untuk selanjutnya dapat dipresentasikan pada kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan di Universitas Mataram kerjasama dengan Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO) pada tanggal 2 November 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyauddin., A. M. Lahjie dan S. Balkis. (2010). Analisis Finansial Hutan Tanaman Rakyat Karet dan Sengon di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. *Jurnal Kehutanan Tropika Humida*, 3 (1) : 15-27.
- Anomsari, E. T. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, (Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam Kebumen). *Jurnal Natapraja*, 1 (1) : 75-91.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BLU Pusat (P2H). (2017, 21 Desember). Kredit Tunda Tebang, Bantu Petani Hutan Rakyat dan Penyelamatan Hutan. 19 September 2019, diunduh dari <https://blup3h.id/kredit-tunda-tebang-bantu-petani-hutan-rakyat-dan-penyelamatan-hutan/>
- Budiningsih, K. dan R. Effendi. (2013). Analisis Kelayakan Finansial Hutan Tanaman Jelutung (*Dyera polyphylla*) di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10 (1) : 17-23.
- Kadariah., Karlina dan C. Gray. (1997). *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Khotimah, H. dan Sutisno. (2014). Analisis Kelayakan Finansial Usaha Budidaya Bambu. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 8 (1), 14-24.
- Kusumedi, P. dan A. Nawir. (2010). Analisis Finansial dan Pengelolaan Hutan Rakyat Kemitraan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 7 (1) : 1-21.
- Malau, R., A. M. Lahjie, B. D. A. S. Simarankir dan Z. Hasid. (2013). Analisis Investasi Permodelan Lahan Hutan dengan Sistem Agroforestri Landskap. *Jurnal Hutan Tropis*, 1 (1) : 39-45.
- Manalu, B. E., S. Latifah dan P. Patana. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Mando, L. O. A. S., U. O. Hasani, L. O. Midi, dan S. Bana. (2018). Potensi dan Pola Hutan Rakyat di Dusun Singlar Kabupaten Sleman. *Seminar Nasional Silvikultur V dan Kongres Masyarakat Silvikultur Indonesia IV : Silvikultur untuk Hutan Produksi Lestari dan Rakyat Sejahtera*. Banjar Baru. 23 Agustus.
- Midi, L. O. dan L. O. A. S. Mando. (2015). Penaksiran Potensi Kayu dari Hutan Rakyat di Kecamatan Barangka Kab. Muna. *Ecogreen*, 1 (1) : 89-100.

- Pentury, E. F., J. Baroleh dan W. Wangke. (2016). *Partisipasi Anggota pada Kelompok Tani Susuripen di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Pratama, A. R., S.B. Yuwono dan V. Hilmanto. (2015). Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Kelompok Pemilik Hutan Rakyat di Desa Bandar dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Sylva Lestari*, 3 (2) : 99-112.
- Sagita, M. N., Akhbar dan H. Muis. (2019). Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7 (2) : 1-10.
- Setiawan, B. dan A. M. Lahjie. (2011). Analisis Finansial Sistem Agroforestri Jati, Sungkai dan Rumput Gajah di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Kehutanan Tropika Humida*, 4 (1) : 13-27
- Setiawan, H., B. Barus dan Suwardi. (2014). Analisis Potensi Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah. *Majalah Ilmiah Globe*, 6 (1) : 69-76.
- Simon, H. (2008). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Cooperative Forest Management), Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Simon, H. (2010). *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Simon, H. (2015). *Metode Inventore Hutan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, A., Hardjanto. dan L. Sundawati. (2016). Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga Kabupaten Kuningan. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7 (1) : 8-17.
- Sukisman dan S. R. Hardoyo. (2011). Partisipasi Masyarakat Anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan. *Majalah Geografi Indonesia*, 25 (2) : 178-197.
- Suprayitno, A. R., Sumarjo., D. S. Gani. dan B. G. Sugihen. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Sekitar Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusarung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8 (3) : 176-195.
- Sutisna. (2015). Analisis Finansial Usaha Hutan Rakyat Pla Monokultur, Campuran, dan Agroforestri di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 3 (2) : 124-132.
- Suwardane, K. E., I. D. P. O. Suardi dan M. TH. Handayani. (2015). Partisipasi Petani dalam Pengembangan Program Hutan Rakyat di Dusun Talng Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 4 (2) : 86-96. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/JAA/article/view/17391>.
- Tanjung, N. S., D. Sadono dan C. T. Wibowo. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*. 13 (1) : 14-30.
- Winata, A. dan E. Yuliana. (2012). Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *Mimbar*, 28 (1) : 65-76.